

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan dengan judul “Peran Komisi Pemilihan Umum Daerah Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Masyarakat Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati 2024 di Kabupaten Malaka”. Penulis menyimpulkan bahwa:

1. Pendidikan Politik Dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Malaka telah melaksanakan pendidikan politik dengan cara yang terencana dan sesuai dengan hukum yang ada. seperti UU Nomor 1 Tahun 2015 hingga UU Nomor 6 Tahun 2020 serta PKPU Nomor 9 Tahun 2022. Pendekatan yang digunakan mencakup dua dimensi utama, yaitu perencanaan program yang meliputi analisis kebutuhan, penyusunan strategi, kerja sama lintas sektor, dan penganggaran, serta pelaksanaan program melalui sosialisasi, pendidikan pemilih, kampanye anti politik uang, dan pelibatan pemilih muda. Dari perspektif masyarakat, pendidikan politik dipandang sangat penting karena mampu meningkatkan pemahaman demokrasi, membentuk kesadaran kritis, dan mendorong partisipasi yang rasional dalam pemilu. Dengan demikian, terdapat hubungan yang saling mendukung antara kebijakan kelembagaan dan persepsi masyarakat yang menjadi dasar dalam menciptakan demokrasi yang partisipatif dan berintegritas.

2. Media Informasi Untuk Sosialisasi Pemilih, dapat dianalisis bahwa penggunaan media informasi oleh KPU Kabupaten Malaka dalam sosialisasi pemilih merupakan langkah strategis yang sesuai Pemanfaatan media sosial seperti Facebook, Twitter, dan Instagram, serta keberadaan website resmi KPU, ini menunjukkan adaptasi kelembagaan terhadap perkembangan teknologi informasi dalam menyampaikan pesan-pesan pemilu secara cepat, luas, dan interaktif. Pendekatan ini diperkuat dengan kolaborasi bersama organisasi masyarakat dan lembaga pendidikan yang memperluas jangkauan sosialisasi dan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi. Respons positif dari masyarakat, mengindikasikan bahwa informasi yang disampaikan melalui media tersebut tidak hanya diterima dengan baik, tetapi juga berkontribusi langsung terhadap peningkatan pemahaman, kesadaran, dan partisipasi dalam pilkada. Dengan demikian, penggunaan media informasi oleh KPU tidak hanya berhasil menjangkau pemilih secara masif, tetapi juga berperan dalam memperkuat kualitas demokrasi melalui peningkatan literasi politik masyarakat
3. Mendorong Masyarakat Terdaftar Sebagai Peserta Pemilih, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Malaka telah melaksanakan upaya secara sistematis, terarah, dan inklusif. Strategi yang digunakan mencakup sosialisasi dan edukasi publik melalui media sosial, televisi lokal, serta kerja sama yang erat dengan pemerintah daerah, organisasi masyarakat, dan lembaga pendidikan, yang menunjukkan pendekatan kolaboratif dalam membangun kesadaran politik. Selain itu, penyediaan fasilitas pendaftaran

pemilih yang mudah diakses, baik secara daring melalui website resmi maupun secara luring di tempat umum, memperlihatkan pemanfaatan teknologi dan kepekaan terhadap aksesibilitas publik. Respons positif dari masyarakat memperkuat efektivitas strategi tersebut, yang dinilai mampu memberikan informasi yang jelas, mudah dipahami, dan mendukung kemudahan proses pendaftaran. Dengan demikian, upaya KPU dalam mendorong keterlibatan masyarakat sebagai pemilih tidak hanya mencerminkan pemenuhan indikator teknis, tetapi juga berkontribusi terhadap penguatan demokrasi partisipatif yang inklusif dan berkelanjutan.

4. Memastikan Pemilih menggunakan Hak pilih, dapat disimpulkan bahwa KPU Kabupaten Malaka telah merancang dan melaksanakan strategi yang sistematis dan komprehensif guna meningkatkan partisipasi pemilih dalam Pilkada 2024. Strategi tersebut meliputi sosialisasi yang masif melalui berbagai media, pelibatan tokoh masyarakat, kesiapan logistik pemilu, serta penyediaan layanan informasi mengenai Daftar Pemilih Tetap (DPT). Pendekatan ini menunjukkan keseriusan KPU dalam menciptakan proses pemilu yang inklusif, aksesibel, dan partisipatif. Namun demikian, temuan di lapangan menunjukkan bahwa masih terdapat kendala dari sisi pemilih, seperti keterbatasan waktu akibat pekerjaan dan rasa pesimis terhadap representasi politik, yang dapat menghambat partisipasi.

6.2 Saran

1. Peningkatan Intensitas dan Inovasi dalam Pendidikan Politik Pemilih, KPU Kabupaten Malaka disarankan untuk meningkatkan intensitas dan inovasi dalam pelaksanaan pendidikan politik pemilih, tidak hanya terbatas pada penyampaian informasi, tetapi juga melalui metode partisipatif seperti forum diskusi, simulasi pemilu, dan pelatihan bagi pemilih pemula. Hal ini penting untuk menumbuhkan kesadaran kritis dan literasi politik masyarakat secara menyeluruh, sehingga dapat memperkuat kualitas demokrasi lokal.
2. Optimalisasi Pemanfaatan Media Digital Secara Terintegrasi Mengingat peran penting media informasi dalam penyebaran edukasi pemilu, KPU Malaka diharapkan dapat mengembangkan pendekatan komunikasi digital yang lebih interaktif, seperti konten video edukatif, infografis di media sosial, serta kampanye daring berbasis komunitas. Strategi ini akan memperluas jangkauan informasi sekaligus meningkatkan keterlibatan masyarakat terutama generasi muda yang aktif di ruang digital.
3. Pendekatan Kolaboratif Berbasis Kebutuhan Lokal dalam Meningkatkan Partisipasi Pemilih Diperlukan pendekatan kolaboratif yang lebih berbasis kebutuhan lokal untuk mengatasi hambatan partisipasi pemilih. KPU Malaka dapat melakukan pemetaan sosial untuk memahami alasan apatisme atau hambatan personal seperti pekerjaan dan ketidakpercayaan terhadap proses politik. Hasil pemetaan ini dapat dijadikan dasar untuk menyusun strategi yang

adaptif, misalnya penjadwalan sosialisasi yang fleksibel dan pendekatan persuasif melalui tokoh lokal.

4. Penguatan Layanan dan Fasilitas Aksesibilitas Pemilu untuk Kelompok Rentan
Untuk menjamin penggunaan hak pilih secara merata, KPU Kabupaten Malaka disarankan untuk memperkuat layanan dan fasilitas pemilu bagi kelompok rentan seperti penyandang disabilitas, masyarakat adat, serta pemilih di daerah terpencil. Penyediaan transportasi pemilu, petugas pendamping di TPS, serta informasi dalam berbagai format (audio, visual, dan bahasa daerah) dapat menjadi solusi konkret yang menjamin inklusivitas dan keadilan dalam pilkada.